



**ANALISIS DATA HASIL SURVEI ONLINE
3AS TRIWULAN IV TAHUN 2022**

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

BerAKHLAK

**# bangga
melayani
bangsa**



**LAPORAN ANALISIS DATA HASIL SURVEI ONLINE 3AS INDEKS
PERSEPSI KORUPSI DAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IPK-IKM)
SERTA INTEGRITAS
(Januari s.d Desember)
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Proses percepatan pembangunan zona integritas (ZI) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di Kementerian Hukum dan HAM harus terus dijalankan melalui peningkatan kualitas layanan publik pada seluruh unit kerja yang ada sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Salah satu alat untuk mengukur kualitas layanan publik tersebut adalah dengan melaksanakan survei Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan masyarakat (IPK-IKM) serta Integritas oleh seluruh satuan kerja (Satker) yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM baik di tingkat pusat maupun wilayah. Survei ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan mengukur tingkat integritas dalam rangka pemetaan unit kerja yang berpotensi untuk diusulkan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rangka mendapatkan informasi terkait permasalahan yang muncul terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Satker di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan untuk memberikan rekomendasi peningkatan kualitas layanan publik secara lebih objektif berdasarkan data hasil Survei IPK-IKM dan Integritas, maka Kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan analisis data hasil survei sebagaimana dimaksud terhadap seluruh Satker di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta secara periodik di tahun 2022.

2. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan analisis data hasil survei *online* 3AS periode Januari s.d. Desember 2022 ini adalah untuk menemukan informasi yang bermanfaat berdasarkan data hasil Survei IPK-IKM dan Integritas, sehingga dapat memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan dan menemukan solusi terhadap permasalahan dan/atau kendala yang terjadi terhadap pelayanan publik yang diberikan Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

3. Ruang Lingkup

Subjek dari kegiatan analisis data hasil survei *online* 3AS periode Januari s.d. Desember 2022 ini adalah seluruh Satker yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta Sedangkan, objek kegiatan ini adalah saran/masukan perbaikan yang diberikan responden yang ada di dalam Survei IPK-IKM serta unsur-unsur terendah di dalam Survei Integritas.

4. Dasar

- a. Target Kinerja (Tarja) Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022;
- b. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Data Survei IPK-IKM dan Integritas Tahun 2022, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.

5. Penentuan Lokus Kegiatan Analisa Data

Penentuan Satker (Kanwil dan/atau UPT) yang menjadi lokus kegiatan analisa data hasil Survei *Online* 3AS IPK-IKM dan Integritas adalah sebanyak 17 (tujuh belas) Satker yang memenuhi salah satu atau beberapa kriteria, sebagai berikut:

- Nilai rata-rata 2022 yang terendah dengan berdasarkan keterwakilan jenis UPT yakni UPT Pemasarakatan dan UPT Keimigrasian, dengan responden minimal 30 pengguna layanan;
- UPT yang tidak melakukan survei atau jumlah responden tidak memenuhi jumlah minimal;

Pelaksanaan analisa data hasil Survei *Online* 3AS IPK-IKM dan Integritas ini dilakukan secara *online* dengan melihat hasil survei pada aplikasi 3AS.

6. *Timeline* Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 1. Timeline Kegiatan

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
Pembentukan Tim	X											
Pengumpulan data	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Penyusunan Laporan			X			X			X			X

B. HASIL YANG DICAPAI

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 1. Hasil Monitoring IPK IKM

No	Bulan	Komponen						
		IKM	IPK	Responden	Prioritas Perbaikan	Integritas	Responden	Prioritas Perbaikan
1	Januari	19.12	14.36	43	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi; 2. Diskriminasi; 3. Kecurangan; 4. Persyaratan; 5. Prosedur/Alur; 6. Gratifikasi; 7. Pungli; 8. Waktu Penyelesaian; 9. Calo; 10. Tarif/Biaya; 11. Sarana/ Prasarana; 12. Respon; 13. Konsultasi&pengaduan 	96.42	137	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya Organisasi dan Sistem anti korupsi; 2. Pengelolaan SDM; 3. Pelaksanaan Anggaran; 4. Kesesuaian perintah atasan dengan aturan& Norma.
2	Februari	19.68	14.69	90	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskriminasi; 2. Kecurangan; 3. Persyaratan; 4. Prosedur/Alur; 5. Gratifikasi; 6. Pungli; 7. Waktu Penyelesaian; 8. Calo; 9. Tarif/Biaya; 10. Sarana/Prasarana; 11. Respon; 12. Konsultasi & pengaduan 	97.68	230	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya Organisasi dan Sistem anti korupsi; 2. Pengelolaan SDM; 3. Pelaksanaan Anggaran; 4. Kesesuaian perintah atasan dengan aturan& Norma.

3	Maret	19.95	14.93	101	1. Kebijakan Pelayanan; 2. Profesionalisme SDM; 3. Kualitas Sarana Prasarana; 4. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik; 5. Konsultasi dan Pengaduan; 6. Penghilangan Praktek Pungli.	97.39	133	1. Transparansi; 2. Perjalanan Dinas; 3. Penempatan Pegawai; 4. Kode Etik
4	April	19.80	14.89	124	1. Informasi; 2. Diskriminasi; 3. Persyaratan; 4. Kecurangan; 5. Prosedur/Alur; 6. Sarana Prasarana; 7. Respon;	98.59	107	1. Honorarium
5	Mei	19,94	14,94	114	1. Kebijakan Pelayana; 2. Kualitas Sarana Prasarana; 3. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik.	98,05	92	1. Budaya organisasi dan sistem anti korupsi; 2. Pengelolaan SDM dalam penerimaan dan penempatan pegawai; 3. Pelaksanaan Anggaran; 4. Kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma.
6	Juni	19.88	14.89	55	Pertahankan	98.12	111	Pertahankan
7	Juli	17.50	17.50	43	Pertahankan	98.29	63	1. Pencegahan Korupsi 2. Perjalanan Dinas 3. Honorarium 4. Bukti Transaksi
8	Agustus	17.44	17.47	37	Pertahankan	97.50	124	1. Perlakuan yang sama 2. Privasi Pelapor 3. Proses Pelanggaran 4. Penempatan 5. Promosi Jabatan 6. Presensi Pegawai 7. Perjalanan Dinas 8. Bukti Transaksi 9. Tangung Jawab 10. Pekerjaan Tidak Sesuai

								Aturan 11. Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan 12. Kode Etik
9	September	17.50	17.50	61	Pertahankan	98.41	178	1. Presensi Pegawai 2. Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan
10	Oktober	17.45	17.46	87	1. Kebijakan Layanan 2. Kualitas Sarana Prasarana	98.35	98	Pertahankan
11	November	17.49	17.50	70	Pertahankan	98.77	100	Pertahankan
12	Desember	17.40	17.40	51	Pertahankan	98.67	77	Pertahankan
Nilai Rata – Rata:		18.47	16.23			98.01		

Tabel 1 menggambarkan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh predikat Sangat Baik komponen IPK maupun IKM dan telah memenuhi jumlah minimal responden. Pada periode ini tidak terdapat masukan perbaikan.

Berdasarkan data tersebut, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala Kantor Wilayah adalah dengan mempertahankan capaian hasil survei IPK IKM serta Melakukan evaluasi berkala dan berkelanjutan untuk tetap mempertahankan nilai hasil survey IPK dan IKM.

Sementara itu, terkait dengan hasil survei integritas Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta juga memperoleh predikat Sangat Baik namun terdapat beberapa rekomendasi perbaikan. Oleh karenanya, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala Kantor Wilayah, sebagai berikut:

1. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap survey IPK IKM Unit Pelaksana Teknis secara berkala dan kontinu.
2. Memberikan pendampingan kepada Satuan Kerja agar nilai hasil survey IPK IKM dan integritas bisa maksimal guna mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBK WBBM.

2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rupbasan Kelas II Wates

Tabel 2. Hasil Monitoring

No	Bulan	Komponen						
		IKM	IPK	Responden	Prioritas Perbaikan	Integritas	Responden	Prioritas Perbaikan
1	Januari	19.98	15	22	Persyaratan;	100	16	Pertahankan
2	Februari	19.86	14.90	27	Pertahankan	100	18	Pertahankan
3	Maret	19.92	14.96	31	Pertahankan	100	20	Pertahankan
4	April	20	15	38	Pertahankan	100	30	Pertahankan
5	Mei	20	15	32	Pertahankan	100	20	Pertahankan
6	Juni	20	15	38	Pertahankan	99.97	20	Pertahankan
7	Juli	17.50	17.50	32	Pertahankan	100	21	Pertahankan
8	Agustus	17.48	17.47	18	Pertahankan	100	21	Pertahankan
9	September	17.50	17.50	24	Pertahankan	100	21	Pertahankan
10	Oktober	17.50	17.50	13	Pertahankan	100	21	Pertahankan
11	November	17.45	17.50	30	Pertahankan	100	21	Pertahankan
12	Desember	17.50	17.50	20	Pertahankan	99.95	19	Pertahankan
Nilai Rata – Rata:		18.72	16.23			99.99		

Tabel 2 menggambarkan UPT Rupbasan Kelas II Wates memperoleh predikat Sangat Baik di komponen IPK maupun IKM dan telah memenuhi jumlah minimal responden.

Berdasarkan data tersebut, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala UPT Rupbasan Kelas II Wates, sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi berkala dan berkelanjutan untuk tetap mempertahankan nilai hasil survey IPK dan IKM

Sementara itu, terkait dengan hasil survei integritas UPT Rupbasan Kelas II Wates juga memperoleh predikat Sangat Baik. Oleh karenanya, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala Kantor Wilayah, sebagai berikut:

1. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap survey IPK IKM Unit Pelaksana Teknis secara berkala dan kontinu.
2. Memberikan pendampingan kepada Unit Pelaksana Teknis agar nilai hasil survey IPK IKM dan integritas bisa maksimal guna mendukung Pembangunan Zona Integritas mempertahankan predikat WBBM.

3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Pemsyarakatan Perempuan Kelas II Yogyakarta

Tabel 2. Hasil Monitoring

No	Bulan	Komponen						
		IKM	IPK	Responden	Prioritas Perbaikan	Integritas	Responden	Prioritas Perbaikan
1	Januari	19.64	14.98	29	1. Informasi; 2. Persyaratan; 3. Prosedur/Alur; 4. Waktu Penyelesaian; 5. Konsultasi&pengaduan	96.97	61	1. Proses Pelanggaran dan Pencegahan Korupsi; 2. Pengelolaan SDM; 3. Pelaksanaan Anggaran dalam Perjalanan Dinas dan Honorarium.
2	Februari	19.42	14.71	33	1. Pungli; 2. Waktu Penyelesaian; 3. Calo; 4. Sarana Prasarana; 5. Respon.	96.73	62	1. Budaya Organisasi dan Sistem anti korupsi; 2. Pelaksanaan Anggaran;
3	Maret	19.74	14.76	30	Pungli	97.13	58	1. Proses Pelanggaran 2. Pencegahan Korupsi
4	April	19.51	14.69	33	1. Kualitas Sarana Prasarana; 2. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik; 3. Penghilangan Praktek diluar prosedur.	97.90	57	1. Proses Pelanggaran; 2. Pencegahan Korupsi;
5	Mei	19,84	14,99	30	1. Kebijakan Pelayanan; 2. Profesionalisme SDM; 3. Kualitas Sarana Prasarana; 4. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik.	97,49	74	1. Hukuman pekerjaan tidak sesuai dengan aturan; 2. Kode Etik
6	Juni	19.66	14.76	34	Pertahankan	98.18	67	Pertahankan
7	Juli	17.40	17.50	20	Pertahankan	98	67	1.Menerima Imbalan

								2.Perlakuan yang sama
8	Agustus	17.48	17.47	15	Pertahankan	98.31	67	Pertahankan
9	September	17.33	17.33	15	Pertahankan	97/02	60	Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan
10	Oktober	17.16	17.19	27	1. Profesionalisme SDM 2. Kualitas Sarana Prasarana 3. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik 4. Konsultasi dan Pengaduan	99.16	40	
11	November	17.09	17.19	35	1. Kebijakan Layanan 2. Kualitas Sarana dan prasarana	99.30	83	Pertahankan
12	Desember	17.40	17.40	36	1. Profesionalisme SDM 2. Penghilangan Praktik Pungli 3. Penghilangan Praktik Percaloan	99.70	60	Pertahankan
Nilai Rata – Rata:		18.42	16.19			99.20		

Tabel 2 menggambarkan UPT Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II Yogyakarta memperoleh predikat Sangat Baik di komponen IPK maupun IKM dan telah memenuhi jumlah minimal responden. Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala UPT Rupbasan Kelas II Wates, sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi berkala dan berkelanjutan untuk tetap mempertahankan nilai hasil survey IPK dan IKM

Sementara itu, terkait dengan hasil survei integritas UPT Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II Yogyakarta juga memperoleh predikat Sangat Baik dengan beberapa rekomendasi prioritas perbaikan. Oleh karenanya, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala Kantor Wilayah, sebagai berikut:

1. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap survey IPK IKM Unit Pelaksana Teknis secara berkala dan kontinu.
2. Memberikan pendampingan kepada Unit Pelaksana Teknis agar nilai hasil survey IPK IKM dan integritas bisa maksimal guna mendukung Pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan predikat WBK WBBM.

4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

Tabel 2. Hasil Monitoring

No	Bulan	Komponen						
		IKM	IPK	Responden	Prioritas Perbaikan	Integritas	Responden	Prioritas Perbaikan
1	Januari	19.78	14.91	78	1. Informasi; 2. Persyaratan; 3. Waktu Penyelesaian; 4. Pungli; 5. Respon	98.30	101	1. Budaya organisasi dan sistem anti korupsi pada Menerima imbalan Prosedur, Privasi Pelapor dan Pencegahan Korupsi; 2. Pengelolaan SDM; 3. Pelaksanaan Anggaran dalam PBJ. Honorarium dan bukti transaksi; 4. Kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma.
2	Februari	19.74	14.85	36	1. Kebijakan Pelayanan Publik; 2. Profesionalisme SDM; 3. Kualitas Sarana Prasarana; 4. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik; 5. Konsultasi dan Pengaduan; 6. Penghilangan Prakter diluar prosedur; 7. Penghilangan Prakter Pungli; 8. Penghilangan Praktek Percaloan.	98.63	91	1. Budaya organisasi dan sistem anti korupsi; 2. Pengelolaan SDM dalam penerimaan dan penempatan pegawai; 3. Pelaksanaan Anggaran; 4. Kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma.
3	Maret	19.86	14.88	37	1. Kebijakan Pelayanan Publik; 2. Profesionalisme SDM; 3. Kualitas Sarana Prasarana; 4. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik; 5. Konsultasi dan Pengaduan; 6. Penghilangan Praktek diluar	99.44	51	Pertahankan

					prosedur; 7. Penghilangan Praktek Percaloan.			
4	April	19.78	14.80	31	1. Kebijakan Pelayanan; 2. Profesionalisme SDM; 3. Kualitas Sarana Prasarana;	99.49	85	Pertahankan
5	Mei	19,86	14,89	42	1. Kebijakan Pelayanan; 2. Profesionalisme SDM; 3. Kualitas Sarana Prasarana; 4. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik; 5. Konsultasi dan Pengaduan.	99,74	99	Pertahankan
6	Juni	19.82	14.86	49	Pertahankan	98.53	89	1. Transparansi 2. Menerima Imbalan 3. Perlakuan yang sama 4. Prosedur 5. Privasi Pelapor 6. Proses Pelanggaran 7. Pencegahan Korupsi 8. Penerimaan Pegawai 9. Penempatan 10. Pengembangan Kopetensi 11. Kenaikan Pangkat 12. Gaji 13. Presensi Pegawai 14. Perjalanan Dinas 15. PBJ 16. Honorarium 17. Bukti Transaksi 18. Tanggung Jawab 19. Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan 20. Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan 21. Kode Etik

7	Juli	17.40	17.41	36	1. Persyaratan 2. Sarana Prasarana 3. Calo	99.80	47	Pertahankan
8	Agustus	17.29	17.26	45	Pertahankan	99.41	73	Pertahankan
9	September	17.34	17.34	50	Pertahankan	99.50	54	Pertahankan
10	Oktober							
11	November							
12	Desember							
Nilai Rata – Rata:		19.79	14.86			98.87		

Tabel 2 menggambarkan UPT Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta memperoleh predikat Sangat Baik di komponen IPK maupun IKM dan telah memenuhi jumlah minimal responden. Rekomendasi yang diberikan agar Satuan Kerja selalu mengadakan evaluasi terhadap survey IKM IPK.

Sementara itu, terkait dengan hasil survei integritas UPT Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta juga memperoleh predikat Sangat Baik. Pada periode triwulan III ini tidak terdapat rekomendasi perbaikan.

Oleh karenanya, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala Kantor Wilayah, sebagai berikut:

1. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap survey IPK IKM Unit Pelaksana Teknis secara berkala dan kontinu.
2. Memberikan pendampingan kepada Unit Pelaksana Teknis agar nilai hasil survey IPK IKM bisa maksimal guna mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBK WBBM.

5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Pemsyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta

Tabel 2. Hasil Monitoring

No	Bulan	Komponen						
		IKM	IPK	Responden	Prioritas Perbaikan	Integritas	Responden	Prioritas Perbaikan
1	Januari	19.09	14.38	47	1. Kecurangan; 2. Prosedur/Alur; 3. Gratifikasi; 4. Pungli; 5. Calo; 6. Sarana/Prasarana.	99.57	113	1. Prosedur; 2. Pengelolaan SDM pada penempatan dan promosi jabatan; 3. Pelaksanaan Anggaran dalam Pengadaan Barang dan Jasa; 4. Kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma dalam Tanggungjawab dan pekerjaan tidak sesuai aturan.
2	Februari	19.85	14.94	35	1. Kebijakan Pelayanan; 2. Kualitas Sarana Prasarana; 3. Penghilangan Praktek Percaloan;	98.99	65	1. Budaya organisasi dan sistem anti korupsi; 2. Pengelolaan SDM dalam penerimaan dan penempatan pegawai; 3. Pelaksanaan Anggaran; 4. Kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma.
3	Maret	19.63	14.78	44	1. Kebijakan Pelayanan Publik; 2. Profesionalisme SDM; 3. Kualitas Sarana Prasarana; 4. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik; 5. Konsultasi dan Pengaduan; 6. Penghilangan Praktek diluar	100	39	Pertahankan

					prosedur; 7. Penghilangan Prakter Pungli; 8. Penghilangan Praktek Percaloan.			
4	April	19.98	14.96	43	1. Profesionalisme SDM; 2. Kualitas Sarana Prasarana; 3. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik; 4. Penghilangan Praktek Pungli.	98.86	58	1. Transparansi 2. Perlakuan yang sama 3. Prosedur 4. Prosedur Pelanggaran 5. Pencegahan Korupsi
5	Mei	19,38	14,50	34	1. Profesionalisme SDM; 2. Kualitas Sarana Prasarana; 3. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik; 4. Konsultasi dan Pengaduan.	98,74	52	1. Budaya organisasi dan sistem anti korupsi; 2. Pengelolaan SDM dalam penerimaan dan penempatan pegawai; 3. Pelaksanaan Anggaran; 4. Kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma.
6	Juni	19.95	14.96	52	Pertahankan	98.94	83	1. Transparansi 2. Menerima Imbalan 3. Perlakuan yang sama 4. Prosedur 5. Privasi Pelapor 6. Proses Pelanggaran 7. Pencegahan Korupsi 8. Penerimaan Pegawai 9. Penempatan 10. Promosi Jabatan 11. Pengembangan Kopetensi 12. Kenaikan pangkat 13. Gaji 14. Presensi Pegawai 15. Perjalanan Dinas 16. PBJ 17. Honorarium 18. Bukti Transaksi 19. Tangung Jawab 20. Pekerjaan Tidak Sesuai

								Aturan 21.Kode Etik
7	Juli	17.46	17.50	46	Pertahankan	99.91	80	Pertahankan
8	Agustus	17.35	17.40	40	Pertahankan	99.84	79	Pertahankan
9	September	17.26	17.20	40	Pertahankan	99.73	89	Pertahankan
10	Oktober	17.43	17.47	31	1.Profesionalisme SDM 2.Kualitas Sarana dan Prasarana 3.Sistem Informasi dan Pelayanan Publik	99.54	125	1. Promosi Jabatan 2. Honorarium 3. Bukti Transaksi
11	November	17.42	17.38	51	1. Profesionalisme SDM 2. Kualitas Sarana Prasarana 3. Konsultasi dan Pengaduan	99.78	90	Pengembangan Kopetensi
12	Desember	17.46	17.43	39	1. Profesionalisme SDM 2. Kualitas sarana prasarana 3. Sistem Informasi dan pelayanan publik 4. Konsultasi dan Pengaduan 5. Penghilangan Praktik diluar prosedur	99.70	82	Pengembangan Kopetensi
Nilai Rata – Rata:		18.44	16.21			99.53		

Tabel 2 menggambarkan UPT Lembaga Pemsyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta memperoleh predikat Sangat Baik di komponen IPK maupun IKM dan telah memenuhi jumlah minimal responden. Tim merekomendasikan untuk mempertahankan capaian hasil survey dan untuk selalu diadakan evaluasi hasil survey IPK IKM.

Sementara itu, terkait dengan hasil survei integritas UPT Lembaga Pemsyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta juga memperoleh predikat Sangat Baik. Tidak terdapat unsur yang menjadi prioritas perbaikan.

Oleh karenanya, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala Kantor Wilayah, sebagai berikut:

1. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap survey IPK IKM Unit Pelaksana Teknis secara berkala dan kontinu.

2. Memberikan pendampingan kepada Unit Pelaksana Teknis agar nilai hasil survey IPK IKM bisa maksimal guna mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBK WBBM.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta

Tabel 2. Hasil Monitoring

No	Bulan	Komponen						
		IKM	IPK	Responden	Prioritas Perbaikan	Integritas	Responden	Prioritas Perbaikan
1	Januari	19.02	14.02	33	1. Respon; 2. Konsultasi&pengaduan	97.32	42	1. Transparansi; 2. Pengelolaan SDM pada penerimaan pegawai dan kenaikan pangkat; 3. Pelaksanaan Anggaran dalam Perjalanan Dinas.
2	Februari	19.17	14.40	36	1. Kebijakan Pelayanan Publik; 2. Profesionalisme SDM; 3. Kualitas Sarana Prasarana; 4. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik; 5. Konsultasi dan Pengaduan; 6. Penghilangan Praktek diluar prosedur; 7. Penghilangan Praktek Pungli; 8. Penghilangan Praktek Percaloan.	98.52	46	Pengelolaan SDM pada penerimaan pegawai dan kenaikan pangkat;
3	Maret	19.11	14.30	48	1. Diskriminasi 2. Informasi 3. Kecurangan 4. Persyaratan 5. Prosedur / Alur 6. Gratifikasi 7. Pungli 8. Waktu Penyelesaian 9. Calo 10. Tarif/Biaya 11. Sarana dan Prasarana 12. Respon 13. Konsultasi dan Pengaduan	98.72	40	Pertahankan

4	April	19.81	14.85	52	1. Profesionalisme SDM; 2. Kualitas Sarana Prasarana; 3. PenghilanganPraktekPungli.	98.16	49	Pertahankan
5	Mei	19,72	14,88	50	1. Profesionalisme SDM; 2. Kualitas Sarana Prasarana; 3. SistemInformasi dan PelayananPublik; 4. Konsultasi dan Pengaduan.	98,87	51	Pertahankan
6	Juni	19.86	14.90	55	Pertahankan	99.88	45	Perjalanan Dinas
7	Juli	17.50	17.46	51	Pungli	99.51	44	Pertahankan
8	Agustus	17.50	17.50	43	Pertahankan	99.63	50	Pertahankan
9	September	17.40	17.43	35	Pertahankan	99.30	39	Pertahankan
10	Oktober	17.50	17.50	44	Kualitas Sarana dan Prasarana	99.76	35	Pertahankan
11	November	17.45	17.44	44	1. Kebijakan Layanan 2. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik 3. Penghilangkan Praktek Percaloan	99.92	33	Pertahankan
12	Desember	17.49	17.50	40	Pertahankan	99.93	30	Perhatahankan
Nilai Rata – Rata:		18.34	16.11			99.15		

Tabel 2 menggambarkan UPT Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta memperoleh predikat Sangat Baik di komponen IPK maupun IKM dan telah memenuhi jumlah minimal responden. Tim merekomendasikan untuk mempertahankan capaian hasil survey dan Melakukan evaluasi berkala dan berkelanjutan untuk tetap mempertahankan nilai hasil survey IPK dan IKM

Sementara itu, terkait dengan hasil survei integritas UPT Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta juga memperoleh predikat Sangat Baik.

Oleh karenanya, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala Kantor Wilayah, sebagai berikut:

1. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap survey IPK IKM Unit Pelaksana Teknis secara berkala dan kontinu.

2. Memberikan pendampingan kepada Unit Pelaksana Teknis agar nilai hasil survey IPK IKM bisa maksimal guna mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBK WBBM.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman

Tabel 2. Hasil Monitoring

No	Bulan	Komponen						
		IKM	IPK	Responden	Prioritas Perbaikan	Integritas	Responden	Prioritas Perbaikan
1	Januari	19.81	14.77	75	1. Informasi; 2. Diskriminasi; 3. Kecurangan; 4. Persyaratan; 5. Prosedur/Alur; 6. Gratifikasi; 7. Pungli; 8. Waktu Penyelesaian; 9. Calo; 10. Tarif/Biaya; 11. Sarana/Prasarana; 12. Respon; 13. Konsultasi&pengaduan	99.86	115	1. Transparansi dan PrivasiPelapor; 2. Pengelolaan SDM dalam penerimaan pegawai;
2	Februari	19.94	14.79	32	1. Gratifikasi; 2. Pungli; 3. Tarif/Biaya; 4. Calo.	99.95	111	Budaya organisasi dan sistem anti korupsi
3	Maret	19.78	14.62	47	1. Diskriminasi 2. Kecurangan 3. Gratifikasi 4. Pungli 5. Calo	99.93	119	Pertahankan
4	April	19.75	14.83	34	1. Kebijakan Pelayanan; 2. Profesionalisme SDM; 3. Kualitas Sarana Prasarana; 4. SistemInformasi dan PelayananPublik; 5. Konsultasi dan Pengaduan; 6. Penghilangan praktek pungli;	99.84	128	

					7. Penghilangan praktek diluar prosedur; 8. Penghilangan Praktek Percaloan.			
5	Mei	19,94	14,91	48	1. Kebijakan Pelayanan; 2. Profesionalisme SDM; 3. Kualitas Sarana Prasarana; 4. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik; 5. Konsultasi dan Pengaduan; 6. Penghilangan praktek pungli; 7. Penghilangan praktek diluar prosedur.	99,88	113	Pertahankan
6	Juni	19.91	14.95	59	Pertahankan	99.89	115	Pertahankan
7	Juli	17.40	17.38	40	Pertahankan	99.83	118	Pertahankan
8	Agustus	17.39	17.36	55	Pertahankan	99.64	109	Pertahankan
9	September	17.26	17.33	36	Pertahankan	99.68	115	Pertahankan
10	Oktober	16.91	17.01	42	1. Kebijakan Pelayanan 2. Profesionalisme petugas 3. Kualitas Sarana Prasarana 4. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik 5. Konsultasi dan pengaduan	99.72	105	Pertahankan
11	November	17.10	16.83	43	1. Informasi 2. Persyaratan 3. Prosedur /Alur 4. Waktu Penyelesaian 5. Tarif /Biaya 6. Sarana Prasarana 7. Respon 8. Konsultasi dan pengaduan 10. Diskriminasi 11. Kecurangan 12. Pungli 13. Calo	99.53	109	Pertahankan
12	Desember	17.35	17.40	45	1. Kebijakan Pelayanan	99.99	107	Pertahankan

				2. Profesionalisme SDM 3. Kualitas Sarana dan Prasarana 4. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik 5. Konsultasi dan pengaduan 6. Penghilangan Praktik diluar Prosedur			
Nilai Rata – Rata:	18.41	16.11			99.80		

Tabel 2 menggambarkan UPT Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman memperoleh predikat Sangat Baik di komponen IPK maupun IKM dan telah memenuhi jumlah minimal responden. Sementara itu, terkait dengan hasil survei integritas UPT Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman juga memperoleh predikat Sangat Baik.

Berdasarkan data tersebut, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala UPT Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman, sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi berkala dan berkelanjutan untuk tetap mempertahankan nilai hasil survey IPK dan IKM

Sementara itu, terkait dengan hasil survei integritas UPT Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman juga memperoleh predikat Sangat Baik. Oleh karenanya, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala Kantor Wilayah, sebagai berikut:

1. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap survey IPK IKM Unit Pelaksana Teknis secara berkala dan kontinu.
2. Memberikan pendampingan kepada Unit Pelaksana Teknis agar nilai hasil survey IPK IKM bisa maksimal guna mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBK WBBM.

8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lapas Kelas IIB Wonosari

Tabel 2. Hasil Monitoring

No	Bulan	Komponen						
		IKM	IPK	Responden	Prioritas Perbaikan	Integritas	Responden	Prioritas Perbaikan
1	Januari	19.86	14.85	52	1. Calo; 2. Respon;	90.90	67	Pengelolaan SDM pada pengembangan kompetensi;
2	Februari	19.87	14.91	46	Informasi	99.90	53	Pengelolaan SDM pada pengembangan kompetensi;
3	Maret	19.81	14.96	45	1. Profesionalisme SDM; 2. Kualitas Sarana Prasarana; 3. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik; 4. Konsultasi dan Pengaduan.	99.82	59	-
4	April	19.90	14.92	43	1. Kebijakan Pelayanan Publik; 2. Profesionalisme SDM; 3. Kualitas Sarana Prasarana; 4. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik; 5. Konsultasi dan Pengaduan; 6. Penghilangan Praktek diluar prosedur; 7. Penghilangan Praktek Pungli; 8. Penghilangan Praktek Percaloan.	99.21	64	Pertahankan
5	Mei	19,98	14,98	46	1. Profesionalisme SDM; 2. Kualitas Sarana Prasarana.	99,87	57	Pertahankan
6	Juni	19.93	14.88	45	Gratifikasi	99.68	55	Pertahankan
7	Juli	17.49	17.50	42	Pertahankan	99.95	45	Pertahankan
8	Agustus	17.44	17.42	41	Pertahankan	99.87	51	Pertahankan

9	September	17.42	17.45	33	Pertahankan	99.93	41	Pertahankan
10	Oktober	17.50	17.48	31	1.Kebijakan Pelayanan 2.Profesionalisme SDM 3.Kualitas Sarana dan Prasarana 4.Sistem Informasi dan pelayanan publik 5.Konsultasi dan Pengaduan 6.Penghilangkan Praktik Pungli 7.Penghilang Praktik diluar prosedur 8.Penghilang Praktek Percaloan	99.87	69	Pertahankan
11	November	17.48	17.49	38	Pertahankan	99.90	67	Pertahankan
12	Desember	17.48	17.50	29	1. Kualitas Sarana Prasarana 2. Konsultasi dan Pengaduan 3. Penghilangan praktik pungli	99.66	66	Pertahankan
Nilai Rata – Rata:		18.56	16.30			98.97		

Tabel 2 menggambarkan UPT Lapas Kelas IIB Wonosari memperoleh predikat Sangat Baik di komponen IPK maupun IKM dan telah memenuhi jumlah minimal responden.

Berdasarkan data tersebut, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala UPT Lapas Kelas IIB Wonosari, sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi berkala dan berkelanjutan untuk tetap mempertahankan nilai hasil survey IPK dan IKM

Sementara itu, terkait dengan hasil survei integritas UPT Lapas Kelas IIB Wonosari juga memperoleh predikat Sangat Baik.

Oleh karenanya, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala Kantor Wilayah, sebagai berikut:

1. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap survey IPK IKM Unit Pelaksana Teknis secara berkala dan kontinu.
2. Memberikan pendampingan kepada Unit Pelaksana Teknis agar nilai hasil survey IPK IKM bisa maksimal guna mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBK WBBM.

9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rutan Kelas IIB Bantul

Tabel 2. Hasil Monitoring

No	Bulan	Komponen						
		IKM	IPK	Responden	Prioritas Perbaikan	Integritas	Responden	Prioritas Perbaikan
1	Januari	19.90	14.93	41	1. Informasi; 2. Persyaratan; 3. Waktu Penyelesaian;	98.10	72	1. Budaya organisasi dan sistem anti korupsi; 2. Pengelolaan SDM dalam penerimaan dan penempatan pegawai; 3. Pelaksanaan Anggaran; 4. Kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma.
2	Februari	19.91	14.90	46	Pertahankan	97.96	75	1. Budaya organisasi dan sistem anti korupsi; 2. Pengelolaan SDM dalam penerimaan dan penempatan pegawai; 3. Pelaksanaan Anggaran; 4. Kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma.
3	Maret	19.93	14.92	48	1. Kebijakan Pelayanan; 2. Kualitas Sarana Prasarana.	99.05	73	Pertahankan
4	April	19.98	14.97	62	1. Kebijakan Pelayanan; 2. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik.	99.27	62	Pertahankan
5	Mei	19,97	14,97	73	Pertahankan	99,48	68	Pertahankan
6	Juni	19.98	14.99	65	Pertahankan	98.35	65	1.Menerima Imbalan 2.Perlakuan yang sama 3. Prosedur 4. PrivasiPelapor 5. Proses Pelanggaran

								<ul style="list-style-type: none"> 6. Pencegahan Korupsi 7. Penerimaan Pegawai 8. Promosi Jabatan 9. Pengembangan Kompetensi 10. Kenaikan Pangkat 11. Gaji 12. Presensi Pegawai 13. Perjalanan Dinas 14. PBJ 15. Honorarium 16. Bukti Transaksi 17. Tanggung Jawab 18. Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan
7	Juli	17.49	17.48	50	Pertahankan	98.99	69	Pertahankan
8	Agustus	17.36	17.29	48	Pertahankan	99.08	68	Pertahankan
9	September	17.48	17.49	70	Pertahankan	99.19	71	Pertahankan
10	Oktober	17.48	17.50	39	Pertahankan	98.10	71	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menerima Imbalan 2. Perlakuan yang sama 3. Prosedur 4. Privasi Pelapor 5. Proses Pelanggaran 6. Pencegahan Korupsi 7. Penerimaan Pegawai 8. Penempatan 9. Promosi Jabatan 10. Pengembangan kompetensi 11. Kenaikan pangkat 12. Gaji 13. Presensi Pegawai 14. Perjalanan Dinas 15. PBJ 16. Honorarium 17. Bukti Transaksi 18. Tanggung jawab 19. Pekerjaan tidak sesuai aturan 20. Hukuman pekerjaan tidak

								sesuai aturan Kode etik
11	November	17.49	17.50	32	Pertahankan	98.64	62	Pertahankan
12	Desember	17.35	17.31	79	1. Kebijakan Pelayanan 2. Profesionalisme SDM 3. Kualitas Sarana Prasarana 4. Sistem informasi dan pelayanan publik 5. Konsultasi dan pengaduan 6. Penghilangan praktik pungli 7. Penghilangan praktik diluar prosedur 8. Penghilangan Praktik Percaloan	98.52	72	Pertahankan
Nilai Rata – Rata:		18.57	16.29			98.65		

Tabel 2 menggambarkan UPT Rutan Kelas IIB Bantul memperoleh predikat Sangat Baik di komponen IPK maupun IKM dan telah memenuhi jumlah minimal responden. Berdasarkan data tersebut, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala UPT Rutan Kelas IIB Bantul, sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi berkala dan berkelanjutan untuk tetap mempertahankan nilai hasil survey IPK dan IKM

Sementara itu, terkait dengan hasil survei integritas UPT Rutan Kelas IIB Bantul juga memperoleh predikat Sangat Baik.

Oleh karenanya, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala Kantor Wilayah, sebagai berikut:

1. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap survey IPK IKM Unit Pelaksana Teknis secara berkala dan kontinu.
2. Memberikan pendampingan kepada Unit Pelaksana Teknis agar nilai hasil survey IPK IKM bisa maksimal guna mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBK WBBM.

10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rutan Kelas IIB Wates

Tabel 2. Hasil Monitoring

No	Bulan	Komponen						
		IKM	IPK	Responden	Prioritas Perbaikan	Integritas	Responden	Prioritas Perbaikan
1	Januari	19.78	14.86	33	1. Informasi; 2. Diskriminasi; 3. Kecurangan; 4. Prosedur/Alur; 5. Gratifikasi; 6. Tarif/Biaya; 7. Konsultasi&pengaduan	99.97	46	Pertahankan.
2	Februari	19.93	14.93	30	KebijakanPelayanan.	100	18	Pertahankan.
3	Maret	20	15	34	1. KebijakanPelayanan; 2. Profesionalisme SDM; 3. Kualitas Sarana Prasarana;	99.96	65	Pertahankan
4	April	19.99	14.99	33	1. SistemInformasi dan PelayananPublik; 2. Konsultasi dan Pengaduan;	99.63	54	Pertahankan
5	Mei	19,86	14,88	44	1. KebijakanPelayanan; 2. Profesionalisme SDM; 3. Kualitas Sarana Prasarana; 4. SistemInformasi dan PelayananPublik; 5. Konsultasi dan Pengaduan; 6. Penghilanganpraktekpungli; 7. Penghilanganpraktekdiluarpr osedur; 8. Penghilanganpraktekpercalo an.	99,98	64	Pertahankan
6	Juni	19.99	15	32	Pertahankan	99.96	55	Pertahankan
7	Juli	17.50	17.50	32	Pertahankan	99.90	42	Pertahankan
8	Agustus	17.47	17.43	31	Pertahankan	100	62	Pertahankan

9	September	17.45	17.45	34	Pertahankan	99.62	50	Pertahankan
10	Oktober	17.43	17.47	30	Kualitas Sarana Prasarana	99.43	54	Pertahankan
11	November	17.04	17.05	41	1. Informasi 2. Persyaratan 3. Prosedur /Alur 4. Waktu Penyelesaian 5. Tarif /Biaya 6. Sarana Prasarana 7. Respon 8. Konsultasi dan pengaduan 10. Diskriminasi 11. Kecurangan 12. Pungli 13 Calo	99.94	73	Pertahankan
12	Desember	17.50	17.50	25	1. Kebijakan pelayanan 2. Profesionalisme SDM 3. Kualitas Sarana dan Prasarana 4. Konsultasi dan pengaduan	99.79	51	Pertahankan
Nilai Rata – Rata:		18.55	16.28			99.83		

Tabel 2 menggambarkan UPT Rutan Kelas IIB Wates memperoleh predikat Sangat Baik di komponen IPK maupun IKM dan telah memenuhi jumlah minimal responden.

Berdasarkan data tersebut, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala UPT Rutan Kelas IIB Wates, sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi berkala dan berkelanjutan untuk tetap mempertahankan nilai hasil survey IPK dan IKM

Sementara itu, terkait dengan hasil survei integritas UPT Rutan Kelas IIB Wates juga memperoleh predikat Sangat Baik.

Oleh karenanya, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala Kantor Wilayah, sebagai berikut:

1. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap survey IPK IKM Unit Pelaksana Teknis secara berkala dan kontinu.

2. Memberikan pendampingan kepada Unit Pelaksana Teknis agar nilai hasil survey IPK IKM bisa maksimal guna mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBK WBBM.

11. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rupbasan Kelas II Bantul

Tabel 2. Hasil Monitoring

No	Bulan	Komponen						
		IKM	IPK	Responden	Prioritas Perbaikan	Integritas	Responden	Prioritas Perbaikan
1	Januari	19.85	14.95	34	1. Kebijakan Pelayanan; 2. Kualitas Sarana Prasarana.	99.04	22	Pelaksanaan Anggaran dalam Perjalanan Dinas dan Bukti Transaksi.
2	Februari	19.82	14.90	36	1. Profesionalisme SDM; 2. Kualitas Sarana Prasarana; 3. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik; 4. Konsultasi dan Pengaduan; 5. Penghilangan Praktek Pungli.	98.20	22	Kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma.
3	Maret	19.65	14.78	36	1. Kebijakan Pelayanan; 2. Profesionalisme SDM; 3. Kualitas Sarana Prasarana; 4. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik;	99.28	23	Pertahankan
4	April	19.89	14.92	33	Kualitas Sarana Prasarana.	99.97	23	
5	Mei	19,77	14,88	39	1. Kebijakan Pelayanan; 2. Profesionalisme SDM; 3. Kualitas Sarana Prasarana; 4. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik; 5. Konsultasi dan Pengaduan; 6. Penghilangan praktek pungli; 7. Penghilangan praktek diluar prosedur.	99,29	24	1. Pengembangan Kompetensi; 2. Gaji; 3. Honorarium; 4. Hukuman Pekerjaan tidaksesuaian aturan;
6	Juni	19.93	14.94	44	Pertahankan	99.25	23	Pertahankan
7	Juli	17.27	17.30	31	Pertahankan	99.17	23	Pertahankan
8	Agustus	17.05	17.05	33	1. Informasi 2. Persyaratan 3. Prosedur/Alur	99.28	22	Pertahankan

					4. Waktu Penyelesaian 5. Tarif/Biaya 6. Sarana Prasarana 7. Respon 8. Diskriminasi 9. Kecurangan 10. Gratifikasi 11. Pungli 12. Calo 13. Konsultasi dan Pengaduan			
9	September	17.35	17.31	33	Pertahankan	99.29	24	Pertahankan
10	Oktober	17.44	17.42	34	1. Profesionalisme SDM 2. Kualitas Sarana Prasarana	99.20	23	Pertahankan
11	November	17.38	17.42	33	1. Kebijakan Layanan 2. Penghilangan Praktek diluar prosedur	99.15	23	Pertahankan
12	Desember	17.38	17.33	30	1. Kebijakan Pelayanan 2. Profesionalisme SDM 3. Kualitas Sarana prasarana 4. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik	99.37	23	Pertahankan
Nilai Rata – Rata:		18.45	16.21			99.2		

Tabel 2 menggambarkan UPT Rupbasan Kelas II Bantul memperoleh predikat Sangat Baik di komponen IPK maupun IKM dan telah memenuhi jumlah minimal responden. Meskipun demikian, masih terdapat saran/masukan prioritas perbaikan yang diberikan oleh responden yaitu Bukti Transfer dan Hukuman pekerjaan tidak sesuai aturan.

Berdasarkan data tersebut, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala UPT Rupbasan Kelas II Bantul, sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi berkala dan berkelanjutan untuk tetap mempertahankan nilai hasil survey IPK dan IKM

Sementara itu, terkait dengan hasil survei integritas UPT Rupbasan Kelas II Bantul juga memperoleh predikat Sangat Baik.

Oleh karenanya, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala Kantor Wilayah, sebagai berikut:

1. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap survey IPK IKM Unit Pelaksana Teknis secara berkala dan kontinu.
2. Memberikan pendampingan kepada Unit Pelaksana Teknis agar nilai hasil survey IPK IKM bisa maksimal guna mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBK WBBM.

12. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rutan Kelas IIA Yogyakarta

Tabel 2. Hasil Monitoring

No	Bulan	Komponen						
		IKM	IPK	Responden	Prioritas Perbaikan	Integritas	Responden	Prioritas Perbaikan
1	Januari	19.26	14.40	31	1. Informasi; 2. Diskriminasi; 3. Kecurangan; 4. Persyaratan; 5. Prosedur/Alur; 6. Gratifikasi; 7. Pungli; 8. Waktu Penyelesaian; 9. Calo; 10. Tarif/Biaya; 11. Sarana/Prasarana; 12. Respon; 13. Konsultasi&pengaduan	98.32	65	Proses Pelanggaran
2	Februari	19.72	14.79	39	1. Kebijakan Pelayanan; 2. Profesionalisme SDM; 3. Kualitas Sarana Prasarana; 4. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik;	98.36	66	Pertahankan
3	Maret	19.69	14.87	31	1. Kualitas Sarana Prasarana; 2. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik.	96.95	57	1. Transparansi 2. Menerima Imbalan 3. Prosedur 4. Privasi Pelapor 5. Proses Pelanggaran 6. Pencegahan Korupsi 7. Penerimaan Pegawai 8. Penempatan 9. Promosi Jabatan 10. Pengembangan Kompetensi 11. Kenaikan Pangkat

								Gaji 13. Presensi Pegawai 14. Perjalanan Dinas 15. PBJ 16. Honorarium 17. Bukti Transaksi 18. Pekerjaan Tidak Sesuai 19. Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan 20. Kode Etik
4	April	19.82	14.87	31	1. Kebijakan Pelayanan; 2. Kualitas Sarana Prasarana;	98.25	54	Pertahankan
5	Mei	19,82	14,83	29	1. Kualitas Sarana Prasarana; 2. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik.	98,45	58	Pertahankan
6	Juni	19.79	14.87	30	Pertahankan	98.77	67	Pertahankan
7	Juli	17.38	17.37	24	Pertahankan	98.31	51	Pertahankan
8	Agustus	17.31	17.29	28	Pertahankan	98.44	62	Pertahankan
9	September	17.34	17.33	24	Pertahankan	98.25	50	Pertahankan
10	Oktober	17.29	17.28	26	1. Kebijakan pelayanan 2. Profesionalisme petugas 3. Kualitas sarana prasarana 4. Sistem informasi dan pelayanan publik 5. Konsultasi dan pengaduan 6. Penghilangan praktik pungli 7. Penghilangan praktik diluar prosedur 8. Penghilangan praktik percaloan	98.03	59	Pertahankan
11	November	17.17	17.19	29	1. Respon 2. Konsultasi dan Pengaduan 3. Kebijakan Layanan 4. Kualitas Sarana Prasana 5. Sistem Informasi dan	97.72	58	Pertahankan

					Pelayanan Publik			
12	Desember	17.23	17.39	23	1. Kebijakan Pelayanan 2. Kualitas sarana prasarana 3. Sistem informasi dan pelayanan publik 4. Konsultasi dan Pengaduan 5. Penghilangan Praktik Pungli	97.28	49	Pertahankan
Nilai Rata – Rata:		18.36	16.15			98.06		

Tabel 2 menggambarkan UPT Rutan Kelas IIA Yogyakarta memperoleh predikat Sangat Baik di komponen IPK maupun IKM dan telah memenuhi jumlah minimal responden. Meskipun demikian, masih terdapat saran/masukan prioritas perbaikan yang diberikan oleh responden yaitu Pengembangan kompetensi dan privasi pelapor.

Berdasarkan data tersebut, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala UPT Rutan Kelas IIA Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi berkala dan berkelanjutan untuk tetap mempertahankan nilai hasil survey IPK dan IKM

Sementara itu, terkait dengan hasil survei integritas UPT Rutan Kelas IIA Yogyakarta juga memperoleh predikat Sangat Baik.

Oleh karenanya, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala Kantor Wilayah, sebagai berikut:

1. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap survey IPK IKM Unit Pelaksana Teknis secara berkala dan kontinu.
2. Memberikan pendampingan kepada Unit Pelaksana Teknis agar nilai hasil survey IPK IKM bisa maksimal guna mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBK WBBM.

13. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rupbasan Kelas I Yogyakarta

Tabel 2. Hasil Monitoring

No	Bulan	Komponen						
		IKM	IPK	Responden	Prioritas Perbaikan	Integritas	Responden	Prioritas Perbaikan
1	Januari	19.99	14.99	31	1. Gratifikasi; 2. Prosedur/Alur;	99.93	30	Pelaksanaan Anggaran dalam Honorarium.
2	Februari	20	15	31	Pertahankan	99.96	32	Pertahankan
3	Maret	19.99	15	31	Pertahankan	99.93	31	Pertahankan
4	April	19.89	14.93	32	Pertahankan	99.82	30	Pertahankan
5	Mei	20	15	30	1. Kebijakan Pelayanan; 2. Kualitas Sarana Prasarana; 3. Penghilangan praktek percaloan.	99,83	35	Pertahankan
6	Juni	19.93	14.93	32	Pertahankan	99.96	31	Pertahankan
7	Juli	17.50	17.50	31	Pertahankan	100	30	Pertahankan
8	Agustus	17.41	17.45	33	Pertahankan	100	29	Pertahankan
9	September	17.47	17.43	31	Pertahankan	99.98	31	Pertahankan
10	Oktober	17.50	17.50	31	1.Kebijakan pelayanan 2.Kualitas sarana prasarana 3.Penghilangan praktik pungli	99.96	29	Pertahankan
11	November	17.50	17.50	32	Kualitas Sarana dan Prasana	100	27	Pertahankan
12	Desember	17.50	17.50	31	1. Kualitas Sarana dan Prasarana 2. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik 3. Penghilangan praktik percaloan	99.91	27	Pertahankan
Nilai Rata – Rata:		18.72	16.22			99.95		

Tabel 2 menggambarkan UPT Rupbasan Kelas I Yogyakarta memperoleh predikat Sangat Baik di komponen IPK maupun IKM dan telah memenuhi jumlah minimal responden. Meskipun demikian, masih terdapat saran/masukan prioritas perbaikan yang diberikan oleh responden yaitu honorarium.

Berdasarkan data tersebut, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala UPT Rupbasan Kelas I Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi berkala dan berkelanjutan untuk tetap mempertahankan nilai hasil survey IPK dan IKM

Sementara itu, terkait dengan hasil survei integritas UPT Rupbasan Kelas I Yogyakarta juga memperoleh predikat Sangat Baik.

Oleh karenanya, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala Kantor Wilayah, sebagai berikut:

1. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap survey IPK IKM Unit Pelaksana Teknis secara berkala dan kontinu.
2. Memberikan pendampingan kepada Unit Pelaksana Teknis agar nilai hasil survey IPK IKM bisa maksimal guna mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBK WBBM.

14. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rupbasan Kelas II Wonosari

Tabel 2. Hasil Monitoring

No	Bulan	Komponen						
		IKM	IPK	Responden	Prioritas Perbaikan	Integritas	Responden	Prioritas Perbaikan
1	Januari	19.94	14.90	31	1. Persyaratan; 2. Gratifikasi; 3. Pungli;	100	18	Pertahankan
2	Februari	19.96	14.96	32	Kualitas Sarana Prasarana.	100	18	Pertahankan
3	Maret	19.91	14.92	34	1. Profesionalisme SDM; 2. Kualitas Sarana Prasarana; 3. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik.	100	18	Pertahankan
4	April	19.95	15	31	Pertahankan	99.96	16	Pertahankan
5	Mei	19,95	14,99	30	1. Profesionalisme SDM; 2. Kualitas Sarana Prasarana.	100	18	Pertahankan
6	Juni	19.99	15	30	Pertahankan	99.93	18	Pertahankan
7	Juli	17.50	17.50	31	Pertahankan	100	30	Pertahankan
8	Agustus	17.41	17.45	33	Pertahankan	100	29	Pertahankan
9	September	17.47	17.43	31	Pertahankan	99.98	31	Pertahankan
10	Oktober	17.50	17.50	30	Kualitas sarana Prasarana	100	17	Pertahankan
11	November	17.50	17.50	31	Kualitas Sarana	100	18	Pertahankan
12	Desember	17.50	17.50	31	Pertahankan	100	17	Pertahankan
Nilai Rata – Rata:		18.61	16.34			99.98		

Tabel 2 menggambarkan UPT Rupbasan Kelas II Wonosari memperoleh predikat Sangat Baik di komponen IPK maupun IKM dan telah memenuhi jumlah minimal responden.

Berdasarkan data tersebut, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala UPT Rupbasan Kelas II Wonosari, sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi berkala dan berkelanjutan untuk tetap mempertahankan nilai hasil survey IPK dan IKM

Sementara itu, terkait dengan hasil survei integritas UPT Rupbasan Kelas II Wonosari juga memperoleh predikat Sangat Baik.

Oleh karenanya, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala Kantor Wilayah, sebagai berikut:

1. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap survey IPK IKM Unit Pelaksana Teknis secara berkala dan kontinu.
2. Memberikan pendampingan kepada Unit Pelaksana Teknis agar nilai hasil survey IPK IKM bisa maksimal guna mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBK WBBM.

15. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bapas Kelas I Yogyakarta

Tabel 2. Hasil Monitoring

No	Bulan	Komponen						
		IKM	IPK	Responden	Prioritas Perbaikan	Integritas	Responden	Prioritas Perbaikan
1	Januari	19.95	14.96	38	1. Diskriminasi; 2. Prosedur/Alur;	99.99	79	Pertahankan
2	Februari	19.98	15	30	Pertahankan	99.83	80	Pertahankan
3	Maret	19.90	14.95	44	Pertahankan	99.88	81	Pertahankan
4	April	19.99	14.99	37	Pertahankan	99.97	59	Pertahankan
5	Mei	19,96	15	34	1. Penghilangan Praktek Pungli; 2. Penghilangan praktek diluar prosedur.	99,95	67	Pertahankan
6	Juni	19.93	14.99	37	Pertahankan	99.96	31	Pertahankan
7	Juli	17.48	17.50	20	Pertahankan	99.92	46	Pertahankan
8	Agustus	17.50	17.50	35	Pertahankan	99.80	61	Pertahankan
9	September	17.49	17.50	43	Pertahankan	99.87	70	Pertahankan
10	Oktober	17.50	17.48	33	1.Kualitas sarana prasarana 2.Penghilangan praktik diluar prosedur 3.Penghilangan praktik percaloan	99.97	62	Pertahankan
11	November	17.50	17.50	34	Pertahankan	99.95	66	Pertahankan
12	Desember	17.50	17.50	35	Pertahankan	9970	61	Pertahankan
Nilai Rata – Rata:		18.61	16.23			99.89		

Tabel 2 menggambarkan UPT Bapas Kelas I Yogyakarta memperoleh predikat Sangat Baik di komponen IPK maupun IKM dan telah memenuhi jumlah minimal responden.

Berdasarkan data tersebut, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala UPT Bapas Kelas I Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi berkala dan berkelanjutan untuk tetap mempertahankan nilai hasil survey IPK dan IKM

Sementara itu, terkait dengan hasil survei integritas UPT Bapas Kelas I Yogyakarta juga memperoleh predikat Sangat Baik.

Oleh karenanya, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala Kantor Wilayah, sebagai berikut:

1. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap survey IPK IKM Unit Pelaksana Teknis secara berkala dan kontinu.
2. Memberikan pendampingan kepada Unit Pelaksana Teknis agar nilai hasil survey IPK IKM bisa maksimal guna mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBK WBBM.

16. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bapas Kelas II Wonosari

Tabel 2. Hasil Monitoring

No	Bulan	Komponen						
		IKM	IPK	Responden	Prioritas Perbaikan	Integritas	Responden	Prioritas Perbaikan
1	Januari	19.91	14.90	37	Kecurangan;	99.99	40	Pertahankan
2	Februari	20	15	34	Pertahankan	100	34	Pertahankan
3	Maret	20	14.99	40	Pertahankan	100	34	Pertahankan
4	April	20	14.99	39	Pertahankan	100	34	Pertahankan
5	Mei	19,99	14,99	41	Pertahankan	100	34	Pertahankan
6	Juni	19.99	15	40	Pertahankan	99.98	34	Pertahankan
7	Juli	17.48	17.50	40	Pertahankan	100	34	Pertahankan
8	Agustus	17.48	17.50	40	Pertahankan	100	33	Pertahankan
9	September	17.49	17.49	42	Pertahankan	99.91	33	Pertahankan
10	Oktober	17.48	17.50	33	Pertahankan	100	33	Pertahankan
11	November	17.49	17.50	44	1. Kualitas Sarana Prasarana 2. Konsultasi dan Pengaduan	99.98	35	Pertahankan
12	Desember	17.49	17.50	30	Konsultasi Pengaduan	100	30	Pertahankan
Nilai Rata – Rata:		18.61	16.35			99.98		

Tabel 2 menggambarkan UPT Bapas Kelas II Wonosari memperoleh predikat Sangat Baik di komponen IPK maupun IKM dan telah memenuhi jumlah minimal responden.

Berdasarkan data tersebut, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala UPT Bapas Kelas II Wonosari , sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi berkala dan berkelanjutan untuk tetap mempertahankan nilai hasil survey IPK dan IKM
- Sementara itu, terkait dengan hasil survei integritas UPT Bapas Kelas II Wonosari juga memperoleh predikat Sangat Baik.

Oleh karenanya, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala Kantor Wilayah, sebagai berikut:

1. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap survey IPK IKM Unit Pelaksana Teknis secara berkala dan kontinu.
2. Memberikan pendampingan kepada Unit Pelaksana Teknis agar nilai hasil survey IPK IKM bisa maksimal guna mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBK WBBM.

17. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Tabel 2. Hasil Monitoring

No	Bulan	Komponen						
		IKM	IPK	Responden	Prioritas Perbaikan	Integritas	Responden	Prioritas Perbaikan
1	Januari	18.90	14.36	59	1. Informasi; 2. Diskriminasi; 3. Kecurangan; 4. Persyaratan; 5. Prosedur/Alur; 6. Gratifikasi; 7. Pungli; 8. Waktu Penyelesaian; 9. Calo; 10. Tarif/Biaya; 11. Sarana/Prasarana; 12. Respon; 13. Konsultasi & pengaduan	98.70	83	1. Budaya organisasi dan sistem anti korupsi; 2. Pengelolaan SDM; 3. Pelaksanaan Anggaran dalam Perjalanan Dinas;
2	Februari	19.60	14.85	37	1. Kualitas Sarana Prasarana; 2. Konsultasi & Pengaduan	98.80	81	1. Budaya Organisasi dan Sistem anti korupsi; 2. Pengelolaan SDM; 3. Pelaksanaan Anggaran; 4. Kesesuaian perintah atasan dengan aturan & Norma.
3	Maret	19.43	14.75	81	1. Kebijakan Pelayanan Publik; 2. Profesionalisme SDM; 3. Kualitas Sarana Prasarana; 4. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik; 5. Konsultasi dan Pengaduan; 6. Penghilangan Praktek diluar	99.94	45	Pertahankan

					prosedur; 7. Penghilangan Praktek Pungli; 8. Penghilangan Praktek Peraloan.			
4	April	19.34	14.68	62	1. Informasi 2. Diskriminasi 3. Persyaratan 4. Kecurangan 5. Prosedur/Alur 6. Gratifikasi 7. Waktu Penyelesaian 8. Pungli 9. Calo 10. Tarif /biaya 11. Sarana Prasarana 12. Respon 13. Konsultasi	99.72	27	Kode Etik
5	Mei	19,50	14,66	55	1. Kebijakan Pelayanan; 2. Profesionalisme SDM; 3. Kualitas Sarana Prasarana; 4. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik; 5. Konsultasi dan Pengaduan; 6. Penghilangan praktek diluar prosedur.	99,58	76	Pertahankan
6	Juni	19.37	14.57	49	1. Kecurangan 2. Waktu Penyelesaian 3. Calo 4. Respon	99.55	45	Pertahankan
7	Juli	17.35	17.43	74	Pertahankan	100	30	Pertahankan
8	Agustus	16.98	17.17	180	1. Persyaratan 2. Prosedur/Alur 3. Waktu Penyelesaian 4. Sarana Prasarana 5. Gratifikasi 6. Calo	99.28	76	1.Menerima Imbalan 2.Privasi Pelapor 3.Proses Pelanggaran 4.Pencegahan Korupsi
9	September	16.92	17.14	166	1. Informasi 2. Persyaratan	99.10	64	1. Menerima Imbalan 2. Prosedur

					3. Prosedur/Alur 4. Waktu Penyelesaian 5. Tarif Biaya 6. Sarana Prasarana 7. Respon 8. Konsultasi dan Pengaduan			3.Privasi Pelapor 4.Peserjaan Tidak Sesuai Aturan
10	Oktober	16.95	17.13	105	1.Tarif Biaya 2.Sarana Prasarana 3.Konsultasi dan Pengaduan 4. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik	98.68	62	1. Menerima Imbalan 2. Prosedur 3. Honorarium 4. Tanggung Jawab
11	November	17.30	17.39	110	1. Sarana Prasarana 2. Kebijakan layanan 3. Profesionalisme SDM 4. Kualitas Sarana Prasarana 5. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik 6. Konsultasi dan Pengaduan 7. Penghilangan praktik pungli 8. Penghilangan praktik diluar prosedur 9. Penghilangan praktik percaloan	99.28	74	Pertahankan
12	Desember	17.35	17.40	68	1. Kebijakan Pelayanan 2. Profesionalisme SDM 3. Kualitas Sarana Prasarana 4. Sistem Informasi dan Pelayanan Publik 5. Konsultasi dan Pengaduan 6. Penghilangan Praktik Pungli 7. Penghilangan Praktik diluar Prosedur 8. Penghilangan praktik percaloan	99.49	68	Pertahankan
Nilai Rata – Rata:		18.13	16.07			99.32		

Tabel 2 menggambarkan UPT Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta memperoleh predikat Sangat Baik di komponen IPK maupun IKM dan telah memenuhi jumlah minimal responden. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa saran/masukan prioritas perbaikan yang diberikan oleh responden.

Berdasarkan data tersebut, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala UPT Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan pelayanan publik.
2. Melakukan evaluasi berkala dan berkelanjutan untuk tetap mempertahankan nilai hasil survey IPK dan IKM

Sementara itu, terkait dengan hasil survei integritas UPT Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta juga memperoleh predikat Sangat Baik. Namun, terdapat beberapa unsur rekomendasi perbaikan.

1. Menerima Imbalan
2. Prosedur
3. Privasi Pelapor
4. Pengerjaan Tidak Sesuai Aturan

Oleh karenanya, Tim merekomendasikan model intervensi yang bisa dilakukan Kepala Kantor Wilayah, sebagai berikut:

1. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap survey IPK IKM Unit Pelaksana Teknis secara berkala dan kontinu.
2. Memberikan pendampingan kepada Unit Pelaksana Teknis agar nilai hasil survey IPK IKM bisa maksimal guna mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBk WBBM.

C. PENUTUP

Demikian Laporan Analisis Data Hasil Survei *Online* 3AS Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) serta Integritas periode triwulan IV bulan Desember 2022 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat digunakan dan ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik.



Yogyakarta, 28 Desember 2022
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM DIY



Ditandatangani secara elektronik oleh :

IMAM JAUHARI

NIP. 19630823 199203 1 001